

KEANGGOTAAN INDONESIA PADA ORGANISASI INTERNASIONAL

1). DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)

NO	Nama Organisasi Internasional	Keanggotaan Indonesia		Unit Terkait di Kemlu	Keterangan
		Status dan Tahun	Dasar Hukum		
1	2	3	4	6	7
1	Inter-Parliamentary Union (IPU)	Anggota (1974)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. Sosbud OINB	IPU didirikan tahun 1889 dengan markas besar di Jenewa, Swiss. Indonesia menjadi tuan rumah IPU <i>Assembly</i> ke 104 di Jakarta tahun 2000 dan IPU <i>Assembly</i> ke 116 di Nusa Dua, Bali tahun 2007. Alamat situs: www.ipu.org
2	Association of Secretary General of Parliaments (ASGP)	Anggota (1976)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. Sosbud OINB	Markas besar di Jenewa, Swiss. Alamat situs: www.asgp.info
3	The Parliamentary Union of Islamic Countries (PUIC)	Anggota (1999)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. Sosbud OINB	Dahulu PUOICM (Parliamentary Union of the OIC Member States) kemudian menjadi PUIC tahun 2003 dengan markas besar di Teheran, Iran.
4	ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)	Anggota (1977)	Keppres No. 3 Tahun 1992 ttg Pengesahan Agreement between the Republic of Indonesia and the ASEAN Inter-Parliamentary Organization.	Dit. Sosbud OINB	Statuta AIPO ditandatangani 2 Sept 1977, Statuta diubah 17 April 2007 menjadi AIPA dengan Sekretariat AIPA di Jakarta. General Assembly ke 8 AIPO di Jakarta tahun 1985, General Assembly ke 13 AIPO

					<p>di Jakarta tahun 1992 dan General Assembly ke 18 AIPO di Bali tahun 1997 dan General Assembly ke 24 AIPO di Jakarta tahun 2003.</p> <p>Alamat situs: www.aipasecretariat.org</p>
--	--	--	--	--	---

FOCAL POINT :

Sekretariat Jenderal, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
 Telepon : (021) 5715 841/5715 835/5715 837/5715 813
 Faksimili : (021) 573 2132/573 4460

2). BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)

NO	Nama Organisasi Internasional	Keanggotaan Indonesia		Unit Terkait di Kemlu	Keterangan
		Status dan Tahun	Dasar Hukum		
1	2	3	4	6	7
1	International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI)	Anggota (1956)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. Pl. Ekososbud	<p>INTOSAI dibentuk di Kuba tahun 1953.</p> <p>Keterlibatan BPK dalam INTOSAI diantaranya yaitu sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Professional Standard Committee-Financial Audit Guidelines Subcommittee. 2) Working Group on Environmental Audit (WGEA) 3) Working Group on Accountability for and Audit of Disaster-Related Aid (AADA) 4) Working Group on Fight Against Money Laundering and Corruption (FAIMLAC) 5) Working Group on Key National Indicators 6) Task Force on Global Financial Crisi-Challenge to SAIs 7) INTOSAI

					Development Initiaative (IDI) Alamat situs: www.intosai.org
2	Asian Organization of Supreme Audit Institutions (ASOSAI)	Anggota (1979)	Keppres No. 21 Tahun 1979 ttg Penge- sahan Charter for the Asian Organi- zations of Supreme Audit Institutions (ASOSAI), 1978.	Dit. PI. Ekososbud	ASOSAI dibentuk 1979. Indonesia menjadi anggota Governing Board periode 2009-2012 bersama dengan 10 negara lainnya pada the 10th ASOSAI Assembly di Islamabad, Pakistan Indonesia menjadi tuan rumah ASOSAI Assembly tahun 1997 di Jakarta menghasilkan Jakarta Declaration dan ASOSAI Assembly tahun 1988 di Bali menghasilkan Bali Declaration. Alamat situs: www.asosai.org

FOCAL POINT :

Biro Hubungan Masyarakat dan Luar Negeri
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 31, Jakarta
Telepon : (021) 570 4395 ext. 303/ 272
Faksimili : (021) 570 0607/ 572 0946

3). MAHKAMAH AGUNG (MA)

NO	Nama Organisasi Internasional	Keanggotaan Indonesia		Unit Terkait di Kemlu	Keterangan
		Status dan Tahun	Dasar Hukum		
1	2	3	4	6	7
1	International Association of Supreme Administrative Jurisdictions (IASAJ)	Anggota	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. PI Polkamwil	IASAJ didirikan tahun 1983. Tanggal 29 Februari 2008 telah dilakukan pembahasan dalam Pokja untuk mengkaji rencana pengalihan

					<p>pembayaran kontribusi ke Kemlu. Pada rapat tersebut Pokja belum dapat memutuskan karena <i>focal point</i> belum memenuhi kelengkapan yang dipersyaratkan Pokja. Kemlu meminta <i>focal point</i> untuk melengkapi informasi/ dokumen yang diminta Pokja.</p> <p>Alamat situs: www.iasaj.org</p>
--	--	--	--	--	---

FOCAL POINT :

Ketua Muda
 Urusan Lingkungan PTUN
 Mahkamah Agung (MA)
 Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13
 Jakarta 10010
 Telepon : (021) 384 3348/384 3459/384 3557/381 0350/345 7611
 Faksimili : (021) 381 0357

4). KEJAKSAAN AGUNG (KEJAGUNG)

NO	Nama Organisasi Internasional	Keanggotaan Indonesia		Unit Terkait di Kemlu	Keterangan
		Status dan Tahun	Dasar Hukum		
1	2	3	4	6	7
1	International Association of Anti Corruption Authorities (IAACA)	Anggota (2006)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. PI Polkamwil	<p>IAACA dibentuk tahun 2006 di Wina, Austria.</p> <p>Pembayaran kontribusi tidak sesuai dengan Keppres No. 64 tahun 1999</p> <p>Alamat situs: www.iaaca.org</p>
2	International Association of Prosecutor (IAP)	Anggota (2006)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. PI Polkamwil	Pembayaran kontribusi tidak sesuai dengan Keppres No. 64 tahun 1999

3	Forum Jaksa Agung China – ASEAN	Anggota (2004)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. PI Polkamwil	Pembayaran kontribusi tidak sesuai dengan Keppres No. 64 tahun 1999
---	---------------------------------	----------------	---	-------------------	---

FOCAL POINT :

Bagian Kerjasama Hukum Luar Negeri
 Biro Hukum
 Kejaksaan Agung (Kejagung)
 Jl. Sultan Hasanuddin No. 1
 Jakarta Selatan
 Telepon : (021) 739 5908
 Faksimili : (021) 725 2486

5). KEMENTERIAN DALAM NEGERI (KDN)

No	Nama Organisasi Internasional	Keanggotaan Indonesia		Unit Terkait di Kemlu	Keterangan
		Status dan Tahun	Dasar Hukum		
1	2	3	4	6	7
1	Centre on Integrated Rural Development for the Asia and Pacific (CIRDAP)	Anggota (1979)	Keppres No. 15 Tahun 1979 ttg Pengesahan Agreement for the Establishment of a Center on Intergrated Rural Development for Asia and the Pacific, 29 Januari 1978	Dit. PELH	CIRDAP didirikan 6 Juli 1979 dengan markasnya di Dhaka, Bangladesh. Alamat situs: www.cirdap.org.sg
2	Sub Regional Office of the Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific in Southeast Asia (SOCSEA)	Anggota	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit PELH	SOCSEA dibentuk tanggal 21 Pebruari 1997, dan berke-dudukan di Jakarta

FOCAL POINT :

Kementeriand Dalam Negeri (DDN)
 Jl. Medan Merdeka Utara No. 7
 Jakarta 10110

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Kementerian Dalam Negeri (DDN)
 Jl. Raya Pasar Minggu, Km 19
 Jakarta Selatan
 Telepon : (021) 384 0058
 Faksimili : (021) 381 1120

5). KEMENTERIAN LUAR NEGERI (KEMLU)

NO	Nama Organisasi Internasional	Keanggotaan Indonesia		Unit Terkait di Kemlu	Keterangan
		Status dan Tahun	Dasar Hukum		
1	2	3	4	6	7
1	United Nations Organization (UN)	Anggota (28 September 1950)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Ditjen. Multilateral	<p>PBB berdiri tgl 24 Oktober 1945 melalui Piagam PBB yg ditandatangani 50 negara di San Fransisco tgl 26 Juni 1945.</p> <p>Indonesia menjadi anggota PBB ke 60 pd tgl 28 September 1950, keluar pada tgl. 25 Januari 1965 dan masuk kembali tgl 28 September 1966.</p> <p>Indonesia terpilih sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) PBB periode 2007/2008, sebelumnya pada periode 1973/1974 dan 1995/1996.</p>
2	Association of the Southeast Asian Nations (ASEAN)	Anggota (8 Agustus 1967)	UU No. 38 Tahun 2008 ttg Pengesahan Charter of ASEAN.	Ditjen. KS ASEAN	<p>ASEAN dibentuk tgl 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh 5 negara dengan Sekretariat di Jakarta.</p> <p>Kini negara anggota ASEAN berjumlah 10 negara dengan Piagam ASEAN yang disetujui bulan November 2007.</p>
3	Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)	Anggota (1989)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. KIK Aspasaf	APEC dibentuk tahun 1989 dan Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC di Bogor tahun 1994.
4	United Nations Development Programme (UNDP)	Anggota (28 September 1950)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit PELH	UNDP dibentuk tahun 1958 dan bermarkas di New York, AS.

5	Convention on The Prohibition of the Development, Production, and Stockpiling of Bacteriological (Biological) And Toxin Weapons And on Their Destruction (BWC)	Negara Pihak (1991)	Keppres No. 58 Tahun 1991 tentang Penge-sahan Convention on the Prohibition of Development, Produc-tion, and Stockpiling of Bacterio-logical (Biologi-cal) And Toxin Weapons And on their Destruction	Dit. KIPS	Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC) mulai berlaku pada 26 Maret 1975.
6	Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti Personnel Mines and Their Destruction (Ranjau Darat)	Negara Pihak (2006)	UU No. 20 Tahun 2006 tentang Pengesahan Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti Personnel Mines and Their Destruction	Dit. KIPS	Anti-Personnel Mine Ban Treaty disahkan pada tahun 1997 di Ottawa, Kanada.
7	Preparatory Commission for Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Organization (PrepCom CTBTO)	Negara Pihak (1996)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. KIPS	CTBTO dibentuk tahun 1996 dan bermarkas di Wina, Austria.
8	ASEAN Foundation	Anggota (1997)	Keppres No. 86 Tahun 2001 ttg Pengesahan Agreement between the Government of Indonesia and ASEAN Foundation on the Headquarters Seat of the Foundation.	Dit. KFA ASEAN	ASEAN Foundation ditandatangani tanggal 15 Desember 1997, Revisi MoU tanggal 25 Juli 2000.
9	ASEAN-China Centre	Belum ada (Keanggotaan dimulai setelah seluruh negara pihak menyelesaikan prosedur internal)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. MWAK ASEAN	MoU Pendirian ASE-Asia Centre ditandatangani pada rangkaian KTT ke-12 ASEAN-China di Hua Hin, Thailand tanggal 25 Oktober 2009
10	Indian Ocean Marine Affairs Cooperation (IOMAC)	Anggota	Keppres No. 86 Tahun 1993 ttg Pengesahan Agreement on the Organization for Indian Ocean Marine Affairs Cooperation (IOMAC)	Dit. KIK Aspasaf	Pertemuan IOMAC Pertama bulan Juli 1985 di Kolombo, Sri Lanka.
11	Asia-Europe Foundation (ASEF)	Anggota	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. KIK Amerop	ASEF dibentuk Februari 1997 dan merupakan bagian dari ASEM dengan markas di Singapura.
12	United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)	Anggota	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. PELH	UNITAR dibentuk tahun 1965 dengan markas besar di Jenewa, Swiss.
13	NAM Center for South South Technical Cooperation (NAM CSSTC) / Pusat Kerjasama Teknis Selatan-Selatan Gerakan Non-Blok (PKTSS-GNB)	Anggota	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. Sosbud OINB	NAM CSSTC dibentuk tahun 1995 dengan Sekretariat di Jakarta.
14	Developing Eight (D-8)	Anggota (15 Juni 1997)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. Sosbud OINB	D-8 dibentuk tanggal 15 Juni 1997 dengan Sekretariat di Istanbul, Turki.

					Indonesia menjabat Ketua D-8 periode 2006-2008. KTT ke-5 D-8 di Bali tahun 2006. Dr. Dipo Alam dari Indonesia Sekjen D-8 sampai saat ini.
15	Group of 77 and China (G-77 and China)	Anggota (15 Juni 1964)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. Sosbud OINB	G-77 and China di-bentuk tanggal 15 Juni 1964
16	Group of Fifteen (G-15)	Anggota (September 1989)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. Sosbud OINB	G-15 dibentuk bulan September 1989
17	South Centre (SC)	Anggota (2004)	Keppres No. 1 Tahun 1995 ttg Pengesahan Agreement to Establish the South Centre	Dit. Sosbud OINB	SC dibentuk 31 Juli 1995 dengan markas besarnya di Jenewa, Swiss.
18	International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)	Anggota	UU No. 17 Tahun 1985 ttg Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea.	Dit PI. Polkamwil	ITLOS berdiri 1 Oktober 1996 berdasarkan UNCLOS 1982 dengan markas besar di Hamburg, Jerman.
19	International Seabed Authority (ISA)	Anggota	UU No. 17 Tahun 1985 ttg Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea.	Dit PI. Polkamwil	ISA berdiri tahun 1982 dan bermarkas di Kingston, Jamaica.
20	Organisation of the Islamic Conference (OIC)	Anggota (1969)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. Sosbud OINB	OIC dibentuk di Rabat, Maroko tgl. 25 September 1969 dengan markas di Jeddah, Saudi Arabia. Indonesia menjadi Ketua OIC Peace Committee for Southern Philippines (OIC PCSP)
21	Central Emergency Response Fund (CERF)	Kontributor	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. KIPS	Dana Kemanusiaan PBB untuk menang-gulangi bencana alam dan konflik bersenjata dibawah OCHA.
22	Government Contribution towards Local Office Costs (GLOC) UNDP	Kontributor	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. Sosbud OINB	
23	United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Asia and the Pacific (UNRCPD)	Anggota	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. Sosbud OINB	UNRCPD dibentuk tahun 1987 oleh PBB guna meningkatkan dialog dan <i>confidence building</i> dalam perlucutan senjata dan keamanan regional.

24	United Nations Relief and Work Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)	Anggota	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. Sosbud OINB	UNRWA dibentuk tahun 1949 sebagai wadah pemberi bantuan bagi pengungsi Palestina.
25	Chemical Weapons Convention (Assistance and Protection against Chemical Weapons) Trust Fund	Anggota	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. Sosbud OINB	
26	Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons	Negara Pihak	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. KIPS	Non Proliferation Treaty (NPT) mulai berlaku sejak 1970. NPT merupakan perjanjian antar negara yang ber-upaya mencegah penyebaran senjata nuklir.
27	Capital Master Plan	Kontributor	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Ditjen Multilateral	Dana Pembangunan untuk renovasi gedung fisik Markas Besar PBB di New York, AS.
28	Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)	Negara Pihak (12 Desember 1998)	UU No. 6 Tahun 1998 ttg Pengesahan Convention on the Prohibition of Development, Production, Stock-piling, and Use of Chemical Weapons and on their Destruction	Dit. KIPS	Indonesia menandatangani Chemical Weapon Convention pada tanggal 13 Januari 1993 Dr. Wuri Wuryani pada tanggal 15 Januari 1999 diangkat menjadi Inspektur pada Sekretariat Teknik OPCW dan diperpanjang melalui kontrak khusus selama 1 tahun sejak 23 Januari s.d 31 Desember 2007
29	ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)	Anggota (23 Oktober 2009)	UU No. 38 Tahun 2008 ttg Ratifikasi Piagam ASEAN	Ditjen. KSA ASEAN	Institusi HAM di ASEAN yang bertanggung jawab untuk pemajuan dan perlindungan HAM di ASEAN. AICHR dibentuk 30 Agustus 2009.
<i>Peace Keeping Operation (PKO)</i>					
30	United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)	Kontributor	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. KIPS	Pasukan Perdamaian PBB untuk Libanon dan dibentuk tahun 1978.
31	United Nations Mission in the Sudan (UNMIS)	Kontributor	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. KIPS	Pasukan Perdamaian PBB untuk Sudan dan dibentuk tahun 2005.

32	United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO)	Kontributor	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. KIPS	Pasukan Perdamaian PBB untuk Sahara Barat dan dibentuk tahun 1991.
33	United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP)	Kontributor	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. KIPS	Pasukan Perdamaian PBB untuk Siprus dan dibentuk tahun 1964.
34	United Nations Observer Mission in Georgia (UNOMIG)	Kontributor	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. KIPS	Pasukan Perdamaian PBB untuk Georgia dan dibentuk tahun 1993.
35	United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK)	Kontributor	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. KIPS	Pasukan Perdamaian PBB untuk Kosovo dan dibentuk tahun 1999.
36	United Nations Support to the African Union Mission in Somalia (UNSOA)	Kontributor	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. KIPS	Pasukan Perdamaian PBB untuk Somalia dan dibentuk tahun 2009.
37	United Nations Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUC)	Kontributor	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. KIPS	Pasukan Perdamaian PBB untuk Republik Demokrasi Kongo dan dibentuk tahun 1999.
38	United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE)	Kontributor	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. KIPS	Pasukan Perdamaian PBB untuk Ethiopia dan Eritrea dan dibentuk tahun 2000.
39	United Nations Mission in Liberia (UNMIL)	Kontributor	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. KIPS	Pasukan Perdamaian PBB untuk Liberia dan dibentuk tahun 2003.
40	United Nations Operations in Côte d'Ivoire (UNOCI)	Kontributor	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. KIPS	Pasukan Perdamaian PBB untuk Pantai Gading dan dibentuk tahun 2003.
41	United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH)	Kontributor	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. KIPS	Pasukan Perdamaian PBB untuk Haiti dan dibentuk tahun 2004.
42	United Nations Integrated Mission in Timor Leste (UNMIT)	Kontributor	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. KIPS	Pasukan Perdamaian PBB untuk Timor Leste dan dibentuk tahun 2006.
43	United Nations Mission in the Central African Republic and Chad (MINURCAT)	Kontributor	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. KIPS	Pasukan Perdamaian PBB untuk Central African Republik dan Chad dan dibentuk tahun 2007.

FOCAL POINT

Sekretariat Ditjen Multilateral
Kementerian Luar Negeri (Kemlu)
Jl. Taman Pejambon No.6, Jakarta Pusat
Telp. (021) 3845 8016,
Fax. (021) 384 9411

Dit. Sosbud OINB, Ditjen Multilateral
Kementerian Luar Negeri (Kemlu)
Jl. Taman Pejambon No.6, Jakarta Pusat
Telp. (021) 384 8688
Fax. (021) 350 7950

Dit. PELH, Ditjen Multilateral
Kementerian Luar Negeri (Kemlu)
Jl. Taman Pejambon No.6, Jakarta Pusat
Telp. (021) 384 8626
Fax. (021) 385 7315

Dit. KIPS
Ditjen Multilateral
Kementerian Luar Negeri (Kemlu)
Jl. Taman Pejambon No.6, Jakarta Pusat
Telp. (021) 381 2646
Fax. (021) 385 8024

Dit. HAM dan Kemanusiaan
Ditjen Multilateral
Kementerian Luar Negeri (Kemlu)
Jl. Taman Pejambon No.6, Jakarta Pusat
Telp. (021) 381 2714
Fax. (021) 3813036

Dit. PPIH
Ditjen Multilateral
Kementerian Luar Negeri (Kemlu)
Jl. Taman Pejambon No.6, Jakarta Pusat
Telp. (021) 381 2133
Fax. (021) 351 9593

Dit. PI Polkamwil
Ditjen HPI
Kementerian Luar Negeri (Kemlu)
Jl. Taman Pejambon No.6, Jakarta Pusat
Telp. (021) 384 9618
Fax. (021) 382 4154

Dit. PI Ekososbud
Ditjen HPI
Kementerian Luar Negeri (Kemlu)
Jl. Taman Pejambon No.6, Jakarta Pusat
Telp. (021) 385 8015
Fax. (021) 352 3302

Ditjen Kerjasama ASEAN
Kementerian Luar Negeri (Kemlu)
Jl. Taman Pejambon No.6, Jakarta Pusat
Telp. (021) 350 9048
Fax. (021) 350 9049

Dit. KIK Aspasaf
Ditjen Asia, Pasifik dan Afrika
Kementerian Luar Negeri (Kemlu)
Jl. Taman Pejambon No.6, Jakarta Pusat
Telp. (021) 381 1083
Fax. (021) 384 4867

Dit. KIK Amerop
Ditjen Amerika dan Eropa
Kementerian Luar Negeri (Kemlu)
Jl. Taman Pejambon No.6, Jakarta Pusat
Telp. (021) 381 2778
Fax. (021) 381 3142

6). KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (KEMKUMHAM)

NO	Nama Organisasi Internasional	Keanggotaan Indonesia		Unit Terkait di Kemlu	Keterangan
		Status dan Tahun	Dasar Hukum		
1	2	3	4	6	7
1	Asian African Legal Consultative Organization (AALCO)	Anggota	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. PI Polkamwil	AALCO didirikan pada 15 November 1956 di New Delhi, India.
2	World Intellectual Property Organisation (WIPO)	Anggota	Keppres No. 15 Tahun 1997 ttg Perubahan Keppres No. 24 Tahun 1979 ttg Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization	Dit. PI Ekososbud	WIPO didirikan tahun 1967 dengan markas di Jenewa, Swiss.
3	International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT)	Anggota (2009)	Perpres No. 59 Tahun 2008 ttg Pengesahan Statue of the International Institute for the Unification of Private Law	Dit. PI Polkamwil	Indonesia menjadi anggota UNIDROIT secara resmi pada tanggal 1 Januari 2009.

FOCAL POINT :

Direktorat Hukum Internasional
 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham)
 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta
 Telepon : (021) 5221619
 Faksimili : (021) 5221619

Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual
 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham)
 Jl. Daan Mogot KM 24
 Tengerang 15119

7). KEMENTERIAN KEUANGAN (KEMKEU)

NO	Nama Organisasi Internasional	Keanggotaan Indonesia		Unit Terkait di Kemlu	Keterangan
		Status dan Tahun	Dasar Hukum		
1	2	3	4	6	7
1	International Organisation of Securities Commissions (IOSCO)	Anggota	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. Sosbud OINB	IOSCO didirikan tahun 1983. Bapepam LK sedang berusaha untuk menjadi MoU Signatory.
2	Debt Management and Financial Analysis System – United Nations Conference on Trade and Development (DMFAS – UNCTAD)	Anggota	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. Sosbud OINB	DMFAS Programmes merupakan badan kerjasama teknik untuk pelatihan dan <i>capacity building</i> di bidang manajemen hutang.
3	World Customs Organisation (WCO)	Anggota	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. PPIH	WCO didirikan tanggal 26 Januari 1953, bermarkas besar di Brussel, Belgia.
4	International Fund for Agricultural Development (IFAD)	Anggota (27 September 1977)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. PPIH	IFAD dibentuk tahun 1977 sbg salah satu hasil World Food Conference (1974). Pembayaran kontribusi dilakukan oleh DIPA Depkeu karena sifat kontribusi adalah <i>trust fund</i>
5	OPEC Fund	Kontributor	Keppres No. 35 Tahun 1976 ttg Pengesahan Agreement on the Establishment of the OPEC Special Fund.	Dit. KIPS	Pembayaran kontribusi dilakukan oleh DIPA Depkeu karena sifat kontribusi adalah <i>trust fund</i> .

FOCAL POINT :

Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
 Kementerian Keuangan (Depkeu)
 Jl. Lap. Banteng Timur No. 2-4, Jakarta
 Telepon : (021) 386 4778/345 1128/381 1379
 Faksimili: (021) 384 3712/345 1205

Direktorat Kepabeanan International
 Ditjen Bea dan Cukai
 Kementerian Keuangan (Depkeu)
 Telepon : (021) 489 0308 ext 708, 718
 Faksimili: (021) 489 1845/489 1335

8). KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM)

NO	Nama Organisasi Internasional	Keanggotaan Indonesia		Unit Terkait di Kemlu	Keterangan
		Status dan Tahun	Dasar Hukum		
1	2	3	4	6	7
1	Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) – Centre for Energy	Anggota (1995)	Keppres No. 44 Tahun 1986 ttg Pengesahan Agreement on ASEAN Energy Cooperation.	Dit. PELH	ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM) menyetujui ASEAN Centre for Energy tanggal 26 Oktober 1995.
2	Coordinating Committee for Geoscience Programmes in East and Southeast Asia (CCOP)	Anggota (1969)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. PELH	CCOP dibentuk tahun 1966 di bawah UNESCAP dengan markas besar di Bangkok, Thailand.
3	Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)	Temporary Suspension	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. PELH	Indonesia menjadi anggota OPEC tahun 1962, kini dalam masa <i>temporary suspension</i> sejak 2008.

FOCAL POINT :

Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan
 Direktorat Jenderal Listrik dan Pendayagunaan Energi
 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM)
 Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18
 Telepon : (021) 322 5180 /380 4242

Badan Geologi DESM
 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
 Jl. Diponegoro No. 57, Bandung
 Telepon : (022) 721 2834

9). KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (KEMPERIN)

NO	Nama Organisasi Internasional	Keanggotaan Indonesia		Unit Terkait di Kemlu	Keterangan
		Status dan Tahun	Dasar Hukum		
1	2	3	4	6	7
1	United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)	Anggota	Keppres No. 58 Tahun 1980 ttg Pengesahan Constitution of the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)	Dit. PPIH	UNIDO dibentuk tgl 17 November 1966 dengan markas besar di Wina, Austria.
2	UNIDO Local Office	Anggota	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. PPIH	

FOCAL POINT :

Pusat Administrasi Kerjasama International
 Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
 Kementerian Perindustrian (Depperin)
 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53,
 Jakarta 12950
 Telepon : (021) 525 1132 / 525 5509 / 525 6548
 Faksimili : (021) 525 3278 / 522 9592

10). KEMENTERIAN PERDAGANGAN (KEMDAG)

NO	Nama Organisasi Internasional	Keanggotaan Indonesia		Unit Terkait di Kemlu	Keterangan
		Status dan Tahun	Dasar Hukum		
1	2	3	4	6	7
1	World Trade Organization (WTO)	Anggota (1994)	UU No. 7 Tahun 1994 ttg Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO).	Dit PPIH	WTO dibentuk pada 1 Januari 1995 dengan markas besar di Jenewa, Swiss.
2	International Textiles and Clothing Bureau (ITCB)	Anggota (1984)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit PPIH	ITCB dibentuk 1984 dengan markas besarnya di Jenewa, Swiss.
3	Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC)	Anggota (1970)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit PPIH	ANRPC dibentuk tahun 1970 dengan sekretariat di Kuala Lumpur, Malaysia. Sekjen ANRPC Prof. Dr. Djoko Said Damardjati dari Indonesia.
4	International Pepper Community (IPC)	Anggota (1977)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. PPIH	IPC dibentuk tahun 1972 dengan Sekretariat di Jakarta. Executive Director Mr. Dede Kusuma Idris dari Indonesia.
5	Asian and Pacific Coconut Community (APCC)	Anggota (1969)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit PPIH	Sekretariat APCC di Jakarta.
6	International Coffee Organization (ICO)	Anggota	Perpres No. 63 Tahun 2008 ttg Pengesahan International Coffee Agreement 2007	Dit. PPIH	ICO dibentuk tahun 1963 dengan Sekretariat di London, Inggris.
7	ASEAN Promotion Centre on Trade, Investment and Tourism (APCTIT) / ASEAN – Japan Centre	Anggota (1981)	Keppres No. 10 Tahun 1981 ttg Pengesahan Agree-ment Establishing the ASEAN Promotion Centre on Trade, Investment and Tourism, Tokyo, 1980.	Dit. Kerjasama Ekonomi ASEAN	ASEAN – Japan Centre bermarkas besar di Tokyo, Jepang.
8	Bureau International des Exposition (BIE)	Anggota	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. PPIH	BIE berdiri tahun 1928 dengan markas besar di Paris, Perancis.
9	Global System of Trade Preferences (GSTP)	Anggota	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. PPIH	GSTP dibentuk oleh Group of 77 (G 77) tahun 1976 di Meksiko yang menginginkan

					adanya sistem global perdagangan di antara negara-negara berkembang.
10	Organisation Internationale de Metrologie Legale (OIML)	Anggota	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. PPIH	OIML bermarkas besar di Paris, Perancis.
11	ASEAN - Korea Centre	Anggota (2008)	Keppres No. 65 tahun 2008 ttg Pengesahan MOU on Establishing the ASEAN-Korea Centre	Ditjen KS ASEAN	ASEAN – Korean Centre dibentuk tahun 2009 dengan markas besarnya di Seoul, Korea Selatan.

FOCAL POINT :

Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional
Kementerian Perdagangan (Depdag)
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta 10110
Telepon : (021) 384 1961/384 0139/420 3597/426 6575/426 6576/385 8171 ext 1108
Faksimili : (021) 385 8171/385 8185/ 384 7273 /422 7035

Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN)
Telepon : (021) 310 0569
Faksimili : (021) 3190 4914, 3190 7477

11). KEMENTERIAN PERTANIAN (KEMTAN)

NO	Nama Organisasi Internasional	Keanggotaan Indonesia		Unit Terkait di Kemlu	Keterangan
		Status dan Tahun	Dasar Hukum		
1	2	3	4	6	7
1	Animal Production and Health Commission (APHCA) for Asia and the Pacific	Anggota (1977)	Keppres No 46 Tahun 1976 ttg Pengesahan Agreement for the Establishment of a Regional Animal Production and Health Commission for Asia, the Far East and South West Pacific	Dit. PPIH	APHCA dibentuk bulan Desember 1975 dengan Sekretariat di Bangkok, Thailand.
2	Centre for Aliviation of Poverty through Secondary Crops Development in Asia and the Pacific (CAPSA)	Anggota (1982)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. PPIH	CAPSA dibentuk tgl. 1 April 1982 dengan Sekretariat di Bogor dan merupakan Badan dibawah UNESCAP.
3	Food and Agriculture Organisation (FAO)	Anggota (1949)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. PPIH	Markas besar FAO di Roma, Italia.
4	Office International des Epizooties (OIE) / World Organisation for Animal Health	Anggota (1954)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. PPIH	OIE berdiri tahun 1924 dengan Sekretariat di Paris, Perancis.

5	Regional Network for Agriculture Machinery (RNAM)	Anggota (2006)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. PPIH	RNAM dibentuk tahun 1977 dibawah UNESCAP.
6	World Food Programme (WFP)	Anggota (2006)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. PPIH	WFP dibentuk tahun 1962 guna menanggulangi kelaparan dunia yang bermarkas besar di Roma, Italia.
7	International Cocoa Organization (ICCO)	<i>Observer</i> (dalam proses menjadi Anggota)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. PPIH	Rencana keanggotaan Indonesia pada ICCO telah disetujui Pokja pada tahun 2008, dan kontribusinya akan dibayarkan Kemlu. <i>Focal point</i> masih perlu memproses keanggotaan sesuai peraturan yang berlaku.
8	FAO Representative Office in Jakarta	Anggota (1980)	Kepmenlu No 1162/78/01.	Dit. PPIH	
9	International Sugar Organization (ISO)	<i>Observer</i>	Keppres No. 65 Tahun 1985 ttg Pengesahan International Sugar Agreement, 1984.	Dit. PPIH	Rapat Pokja bulan Mei 2008 telah setuju untuk mengaktifkan kembali keanggotaan. Terkait hal itu, <i>focal point</i> sedang memproses keanggotaan sesuai peraturan yang berlaku.
10	ASEAN Animal Health Trust Fund (AHTF)	Anggota (2006)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. PPIH	AHTF dibentuk 17 November 2006.
11	International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (IT-PGRFA)	Anggota (2006)	UU No. 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture	Dit. PPIH	Indonesia menjadi anggota <i>Governing Body</i> mewakili Asia sebagai Biro dari GB 1 dan GB 3, selain itu juga sebagai anggota <i>Funding Strategy Committee</i> dari ITPGRFA
12	International Seed Testing Association (ISTA)	Anggota (2006)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. PPIH	Pembayaran kontribusi belum sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) Keppres No. 64 Tahun 1999 sbb: 'Kontribusi Pemerintah untuk keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional sebagaimana dimaksud Pasal2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui anggaran Kementerian Luar Negeri'. Rencana pengalihan

					pembayaran kontribusi ke DIPA Kemlu telah dibahas dalam Pokja bulan September 2009. Pokja masih memerlukan informasi lebih lanjut dari <i>focal point</i> nasional, yaitu: Balai Besar PPMB TPH Deptan.
13	The Asia and Pacific Seed Association (APSA)	Anggota (2006)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. PPIH	Pembayaran kontribusi belum sesuai Pasal 5 Ayat (1) Keppres No. 64 Tahun 1999 sbb: 'Kontribusi Pemerintah untuk keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional sebagaimana dimaksud Pasal2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui anggaran Kementerian Luar Negeri'.
14	East Asia Plant Variety Protection (EAPVP) Forum	Anggota (2007)	UU No. 29 Tahun 2000	Dit. PPIH	Pembayaran kontribusi belum sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) Keppres No. 64 Tahun 1999 sbb: 'Kontribusi Pemerintah untuk keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional sebagaimana dimaksud Pasal2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui anggaran Kementerian Luar Negeri'.
15	International Plant Protection Convention (IPPC)	Anggota (1977)	Keppres No. 2 Tahun 1977 jo. Keppres No. 45 Tahun 1990 tentang pengesahan International Plant Protection	Dit. PPIH	Pembayaran kontribusi belum sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) Keppres No. 64 Tahun 1999 sbb: 'Kontribusi Pemerintah untuk keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional sebagaimana dimaksud Pasal2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui anggaran Kementerian Luar Negeri'.
16	Asia Pacific Plant Protection Convention (APPPC)	Anggota (1992)	Keppres No, 58 Tahun 1992 tentang Pengesahan Plant Protection Agreement for the South East Asia and Pacific Region	Dit. PPIH	Pembayaran kontribusi belum sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) Keppres No. 64 Tahun 1999 sbb: 'Kontribusi Pemerintah untuk keanggotaan Indonesia pada

					organisasi internasional sebagaimana dimaksud Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui anggaran Kementerian Luar Negeri.
--	--	--	--	--	--

FOCAL POINT :

Biro Kerjasama Luar Negeri
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Pertanian (Deptan)
 Jl. Pasar Minggu, Jakarta
 Telepon : (021) 781 6485/781 5485/5080-83/786 5035/6
 Faksimili : (021) 781 5581/781 5583/781 5486/781 6480/81

12). KEMENTERIAN KEHUTANAN (KEMHUT)

NO	Nama Organisasi Internasional	Keanggotaan Indonesia		Unit Terkait di Kemlu	Keterangan
		Status dan Tahun	Dasar Hukum		
1	2	3	4	6	7
1	International Tropical Timber Organization (ITTO)	Anggota (1986)	Perpres No. 78 Tahun 2008 ttg Pengesahan International Tropical Timber Agreement, 2006 Keppres No. 4 Tahun 1995 ttg Pengesahan International Tropical Timber Agreement, 1994	Dit. PPIH	ITTO dibentuk berdasarkan International Tropical Timber Agreement, 1983 dengan markas besar di Tokyo, Jepang.
2	Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)	Anggota (1 Juli 1975)	Keppres No. 43 Tahun 1978 ttg Convention on International Trade in Endangered Species of World Fauna and Flora	Dit. PELH	CITES dibentuk tahun 1963 guna melindungi hewan dan tumbuhan yang terancam kepunahan dan bermarkas di Jenewa, Swiss.
3	Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterflow Habitat (RAMSAR)	Anggota (19 Oktober 1991)	Keppres No. 48 Tahun 1991 ttg Pengesahan Convention on Wet-lands of International Importance Especially as Waterflow	Dit. PELH	RAMSAR dibentuk tahun 1971 di Ramsar, Iran bertujuan un-tuk melindungi daerah rawa-rawa dengan markas di Gland, Swiss.
4	United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD)	Anggota (28 Agustus 1998)	Keppres No. 135 Tahun 1998	Dit. PELH	UNCCD dibentuk tahun 1977 guna memerangi penggurunan pada kawasan hijau akibat degradasi dan pengrusakan tanah.

5	Center of International Forestry Research (CIFOR)	Anggota (1993)	UU No. 4 Tahun 2006 ttg Pengesahan Internati-onal Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture Keppres No. 71 Tahun 1993 tentang Penge-sahan Agreement Indonesia sbg Kantor Pusat CIFOR	Dit. PELH	CIFOR merupakan organisasi dibawah Consultative Group on International Agriculture Research (CGIAR)
6	International Union for Conservation of Nature (IUCN)	Anggota (1967)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. PELH	IUCN didirikan ada tahun 1948. Pada tahun 1956 menjadi International Union for Conservation of Nature and Natural Resources dengan markas di Gland, Swiss.
7	International Network for Bamboo and Rattan (INBAR)	Anggota (1994)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. PPIH	INBAR didirikan pada November 1997.
8	International Sericultural Commission (ISC)	Anggota (29 November 1992)	SK-Menhut No:2333/-D/1992	Dit. PELH	ISC dibentuk bulan Juni 1948 dan bermarkas di La Mulatiere, Perancis.
9	Wetland International (WI)	Anggota (1995)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. PELH	WI dibentuk tahun 1995 untuk mengatasi masalah karbon-dioksida dalam jumlah besar akibat dari pengrusakan tanah rawa-rawa.
10.	Asia Pacific Association of Forestry Research Institutions (APAFRI)	Anggota (2000)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. PELH	APAFRI dibentuk 23 Februari 1995 dengan Sekretariat di Kuala Lumpur, Malaysia.
11.	International Federation of Beekeepers' Association (APIMONDIA)	Anggota (1979)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. PELH	APIMONDIA bermarkas di Roma, Italia.

FOCAL POINT :

Pusat Kerjasama Luar Negeri
Kementerian Kehutanan (Dephut)
Gedung Manggala Wanabakti
Jalan Jenderal Gatot Subroto
Jakarta 10270
Telepon : (021) 573 1820
Faksimili : (021) 570 0226

13). KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (KEMHUB)

NO	Nama Organisasi Internasional	Keanggotaan Indonesia		Unit Terkait di Kemlu	Keterangan
		Status dan Tahun	Dasar Hukum		
1	2	3	4	6	7
1	International Civil Aviation Organization (ICAO)	Anggota (27 April 1950)	Keppres No. 46 Tahun 1977 ttg Pengesahan Protokol ttg perubahan pasa 50(A) Konvensi Penerbangan Sipil Internasional.	Dit. PI Polkamwil	ICAO dibentuk tahun 1944 guna menjamin keselamatan penerbangan sipil dengan markas besarnya di Montreal, Kanada.
2	International Maritime Organization (IMO)	Anggota (7 Mei 1960)	Keppres No. 14 Tahun 1996 ttg Pengesahan Amandemen to the Convention on the IMO. Ratifikasi IMO 1948 dgn surat Pejabat Presiden kpd Sekjen IMO No. 9796/1960	Dit. PI Polkamwil	Konvensi IMO diadopsi tahun 1948 dengan markas besar di London, Inggris. IMO pertama kali melakukan pertemuan pada tahun 1959.
3	International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA)	Anggota	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. PI Polkamwil	Pembayaran kontribusi belum sesuai Keppres No. 64 Tahun 1999. Rencana pengalihan pembayaran kontribusi ke DIPA Kemlu telah dibahas dlm Pokja bulan Maret 2009, namun Pokja blm memutuskan krn masih memerlukan informasi yg lbh komprehensif dari <i>focal point</i> nasional.
4	Tokyo – Memorandum of Understanding on Port State Control (MOU)	Anggota	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. PI Polkamwil	Pembayaran kontribusi belum sesuai Keppres No. 64 Tahun 1999.

FOCAL POINT :

Ditjen Perhubungan Laut
Kementerian Perhubungan (Dephub)
Jl. Medan Merdeka Barat
Telepon/Faksimili : (021) 350 7564

Ditjen Perhubungan Udara
Kementerian Perhubungan (Dephub)
Jl. Medan Merdeka Barat
Telepon : (021) 350 7672 / 350 6006 ext 5036
Faksimili : (021) 350 7672

14). KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	Nama Organisasi Internasional	Keanggotaan Indonesia		Unit Terkait di Kemlu	Keterangan
		Status dan Tahun	Dasar Hukum		
1	2	3	4	6	7
1	Network of Aquaculture Centres in Asia - Pacific (NACA)	Anggota (2005)	Perpres No. 72 Tahun 2005 ttg Pengesahan Agree-ment on the Network of Aquaculture Centre in Asia and the Pacific.	Dit. PPIH	Sekretariat NACA berada di Bangkok, Thailand.
2	Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)	Anggota (9 Juli 2007)	Perpres No. 9 Tahun 2007 ttg Pengesahan Agreement for the Establishment of the Indian Ocean Tuna Commission.	Dit PPIH	IOTC bermarkas di Victoria, Seychelles.
3	Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)	Anggota (8 April 2008)	Perpres No. 109 Tahun 2007 ttg Pengesahan Conven-tion for the Conser-vation of Southern Bluefin Tuna.	Dit. PPIH	CCSBT dibentuk bulan Mei 1993 guna melindungi Tuna Sirip Biru dengan markas besar di Canberra, Australia.
4	Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)	Cooperating non Member (2004)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. PPIH	WCPFC didirikan tahun 2004. Pokja sudah menyetujui keanggotaan Indonesia pada WCPFC dan <i>focal point</i> sedang memproses keanggotaan tersebut lebih lanjut.
5	Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC)	Anggota	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. PPIH	SEAFDEC dibentuk Desember 1967 guna pengembangan perikanan yang berkesinambungan dengan Sekretariat di Bangkok, Thailand.

FOCAL POINT :

Kementerian Kelautan dan Perikanan (DKP)
 Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10110
 Telepon : (021) 351 9070
 Faksimili : (021) 352 0351

15). KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (KEMNAKERTRANS)

NO	Nama Organisasi Internasional	Keanggotaan Indonesia		Unit Terkait di Kemlu	Keterangan
		Status dan Tahun	Dasar Hukum		
1	2	3	4	6	7
1	International Labour Organisation (ILO)	Anggota (12 Juni 1950)	UU No. 18 Tahun 1956 tentang ratifikasi konvensi ILO 1958 Keppres No. 26 Tahun 1990	Dit. HAM dan Kemanusiaan, Dit. Sosbud OINB	ILO didirikan tahun 1919 guna melindungi kelas pekerja dengan markas besar di Jenewa, Swiss.
2	Asian Productivity Organization (APO)	Anggota (7 Mei 1968)	Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1968	Dit. HAM dan Kemanusiaan & Dit. Sosbud OINB	Sekretariat APO berada di Tokyo, Jepang. Tagihan kontribusi untuk tahun 2009 sebesar US\$ 389.339,00 namun Pokja tanggal 12 Maret 2009 belum setuju membayarkan kenaikan tersebut karena manfaat yang diperoleh belum optimal. Sehubungan dengan itu, <i>focal point</i> diminta untuk menunjukkan manfaat nyata terlebih dahulu sebelum kenaikan dapat dibayarkan.

FOCAL POINT :

Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri
 Sekretaris Jenderal
 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans)
 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51
 Lt. 3 Blok A, Jakarta 12950
 Telepon : (021) 526 0489
 Faksimili : (021) 525 2538

Direktorat Produktivitas,
 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans)
 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 51,
 Lt. 6 Blok B, Jakarta 12950
 Telepon : (021) 529 63356

16). KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

NO	Nama Organisasi Internasional	Keanggotaan Indonesia		Unit Terkait di Kemlu	Keterangan
		Status dan Tahun	Dasar Hukum		
1	2	3	4	6	7
1	International Commission of Large Dams (ICOLD)	Anggota (1950)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. Sosbud OINB	ICOLD dibentuk tahun 1928 dengan markas besar di Paris, Perancis.
2	International Commission on Irrigation and Drainage (ICID)	Anggota (1950)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. Sosbud OINB	ICID dibentuk pada 24 Juni 1950 dengan markas di New Delhi, India. Indonesia adalah salah satu di antara 11 negara pendiri ICID. Indonesia akan menjadi tuan rumah the 61st IECM and the 6th Asian Regional Conference di Yogyakarta, Oktober 2010.

FOCAL POINT :

Direktorat Irigasi
 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
 Kementerian Pekerjaan Umum (Dep. PU)
 Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110
 Telepon : (021) 739 2262

17). KEMENTERIAN KESEHATAN (KEMKES)

NO	Nama Organisasi Internasional	Keanggotaan Indonesia		Unit Terkait di Kemlu	Keterangan
		Status dan Tahun	Dasar Hukum		
1	2	3	4	6	7
1	World Health Organization (WHO)	Anggota (1950)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. HAM dan Kemanusiaan	WHO didirikan tanggal 7 April 1948 dengan markas besar di Jenewa, Swiss.

FOCAL POINT :

Bagian Kerjasama Luar Negeri
 Biro Perencanaan dan Anggaran
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Kesehatan (Depkes)
 Telepon : (021) 520 1590 ext 8007/8008, 520 1588
 Faksimili : (021) 52104895

18). KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL (KEMDIKNAS)

NO	Nama Organisasi Internasional	Keanggotaan Indonesia		Unit Terkait di Kemlu	Keterangan
		Status dan Tahun	Dasar Hukum		
1	2	3	4	6	7
1	South East Asian Ministers of Education Organisation (SEAMEO)	Anggota (1966)	UU No. 11 Tahun 1968 ttg Pengesahan Charter of the Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO).	Dit. HAM dan Kemanusiaan; Dit Sosbud OINB	SEAMO didirikan tahun 1964. Mendiknas menjadi Ketua SEAMEO Council tahun 2007.
2	UNESCO Jakarta Office	Kontributor	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit Sosbud OINB	

3	Educational Development Fund (SEAMEO EDF)	Anggota	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Ditjen KS ASEAN	SEAMEO EDF dibentuk tahun 1971 sebagai dana dukungan kegiatan dan program SEAMEO.
---	---	---------	---	-----------------	---

FOCAL POINT :

Biro Kerjasama Luar Negeri
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Nasional (Depdiknas)
Jl. Jendral Sudirman Senayan, Jakarta 10270
Telepon : (021) 571 1144

19). KEMENTERIAN AGAMA

NO	Nama Organisasi Internasional	Keanggotaan Indonesia		Unit Terkait Di Kemlu	Keterangan
		Status dan Tahun	Dasar Hukum		
1	2	3	4	6	7
1	Islamic Fiqh Academy (IFA)	Anggota	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit Sosbud OINB	IFA adalah organ subsider OKI, sesuai asas manfaat, pembayaran kontribusi pada organ-organ subsider OKI ditangguhkan.
2	Islamic Education Scientific and Cultural Organization (ISESCO)	Anggota	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit Sosbud OINB	ISESCO adalah organ subsider OKI, sesuai asas manfaat, pembayaran kontribusi pada organ-organ subsider OKI ditangguhkan.

FOCAL POINT :

Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam
Kementerian Agama (Depag)
Jl. Lap. Banteng Barat No. 3-4,
Jakarta Pusat, 10710
Telepon : (021) 351 9734/381 2344/381 2306
Faksimili : ((021) 381 1436

20). KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA (KEMBUDPAR)

NO	Nama Organisasi Internasional	Keanggotaan Indonesia		Unit Terkait di Kemlu	Keterangan
		Status dan Tahun	Dasar Hukum		
1	2	3	4	6	7
1	International Congress and Convention Association - Asia Pacific Chapter (ICCA-APC)	Anggota (1981)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. Sosbud OINB	
2	Pacific Area Travel Association (PATA)	Anggota (1975)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. Sosbud OINB	PATA didirikan tahun 1953.
3	United nations World Tourism Organization (UNWTO)	Anggota	Keppres No. 2 Tahun 1972 ttg Pengesahan Status of the World Tourism Organization.	Dit. Sosbud OINB	UNWTO didirikan tahun 1970.
4	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)	Anggota (27 Mei 1950)	Keppres No. 26 Tahun 1989 ttg Pengesahan Con-vention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. SI-Mendikbud No. 37/KAB tanggal 20 Okt 1950	Dit. Sosbud OINB	Depbudpar menangani masalah yang berkaitan dengan kebudayaan (<i>cultural heritage</i>).
5	UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (UNESCO CSICH)	Anggota (2008)	PP No. 78 Tahun 2007 ttg Pengesahan Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage	Dit. Sosbud OINB	CSICH diadopsi tanggal 3 November 2003.
6	ASEAN NTOs (ASEAN National Tourism Organization)	Anggota (1976)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. Sosbud OINB	
7	ASEAN Tourism Association (ASEANTA)	Anggota	Perpres No. 2 Tahun 2007 ttg Pengesahan ASEAN Tourism Agreement. Keppres No. 54 Tahun 1988 ttg Pengesahan Agreement on the Establishment of the ASEAN Tourism Information Centre.	Dit. Sosbud OINB	Pembayaran kontribusi belum sesuai Keppres No. 64 Tahun 1999.

8	International Federation of Arts Council and Culture Agencies (IFACCA)	Anggota (2006)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. Sosbud OINB	Pembayaran kontribusi belum sesuai Keppres No. 64 Tahun 1999.
---	--	----------------	---	------------------	---

FOCAL POINT :

Biro Kerjasama Luar Negeri
Sekretariat Jenderal
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar)
Telepon : (021) 383 8552
Faksimili : (021) 345 1883/3483 3601

21). KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (KEMKOMINFO)

NO	Nama Organisasi Internasional	Keanggotaan Indonesia		Unit Terkait di Kemlu	Keterangan
		Status dan Tahun	Dasar Hukum		
1	2	3	4	6	7
1	Asia Pacific Telecommunity (APT)	Anggota (29 Mei 1985)	Keppres No. 85 Tahun 2004 ttg Pengesahan Revised Constitution of the Asia Pacific Telecommunity, 2002.	Dit. Sosbud OINB	APT didirikan pada Juli 1979 dengan markas di Bangkok, Thailand.
2	International Telecommunication Union (ITU)	Anggota	UU No. 11 Tahun 1985 ttg Pengesahan International Telecommunications Convention, Nairobi, 1982 UU No. 10 Tahun 1969 ttg Penge-sahan Convention International Tele-communication Union, Montreux 1965. UU No. 11 Tahun 1976 ttg Penge-sahan International Telecommunication Convention, Malaga Terremolinos 1973.	Dit. Sosbud OINB	ITU didirikan 17 Mei 1865 dengan markas besar di Jenewa, Swiss. ITU merupakan Badan PBB yang menangani isu-isu teknologi informasi dan komunikasi.
3	Universal Postal Union (UPU)	Anggota (Mei 1877)	UU No. 13 Tahun 1969 ttg Penge-sahan Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia. Perpres No. 39 Tahun 2008 ttg Pengesahan Universal Postal Convention Perpres No. 5 Tahun 1961 ttg Perjanjian Pos Sedunia dan Persetujuan-persetujuannya.	Dit. Sosbud OINB	UPU dibentuk tahun 1878 guna mengatur pelayanan pos internasional dengan markas besar di Bern, Swiss.

4	Asia Institute Broadcasting Development (AIBD)	Anggota (1977)	Keppres No. 33 Tahun 2001 ttg Pengesahan Aman-demen Agreement Establishing the Asia Pacific Institute for Broadcasting Development.	Dit. Sosbud OINB	AIBD didirikan tanggal 12 Agustus 1977 Indonesia menjadi Ketua AIBD Governing Council 1986-1988 (Drs. Subrata M) Indonesia menjadi Ketua AIBD Executive Committee 2008-2010 (Drs. Freddy H. Tulung MUA)
5	Asian Pacific Postal Union (APPU)	Anggota (12 November 1970)	Keppres No. 5 Tahun 1992 ttg Pengesahan Constitution of the Asian Pacific Postal Union	Dit. Sosbud OINB	APPU dibentuk bulan Agustus 1960 dengan markas besar di Manila, Filipina.
6	Asia Pacific Broadcasting Union (ABU)	Anggota (1964)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. Sosbud OINB	ABU didirikan pada 1 Juli 1964. Indonesia menjadi tuan rumah ABU General Assembly tahun 1971, 1991, 1975, 1979, 1972, 2008. Indonesia menjadi Presiden ABU periode 1980-1983 Indonesia menjadi Vice President ABU periode 1986 (Drs. Subrata)
7	ASEAN ICT Fund	Anggota	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Ditjen. KS ASEAN	ASEAN ICT Fund dibentuk tahun 2004.

FOCAL POINT :

Direktorat Kelembagaan International
Ditjen Pos dan Telekomunikasi
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Depkominfo)
Jl. Medan Merdeka Barat
Telepon : (021) 383 5888/381 1735/3483 0708
Faksimili: (021) 386 0781

PT Pos Indonesia (Persero)
Kantor Pusat
Jalan Banda No. 30
Bandung 40115

22). SEKRETARIAT NEGARA (SETNEG)

NO	Nama Organisasi Internasional	Keanggotaan Indonesia		Unit Terkait di Kemlu	Keterangan
		Status dan Tahun	Dasar Hukum		
1	2	3	4	6	7
1	The Colombo Plan for Cooperative Economic and Social Development in Asia and Pacific (Colombo Plan)	Anggota (1953)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. Sosbud OINB	Colombo Plan dibentuk tahun 1950 guna peningkatan kerja-sama ekonomi dan sosial di Asia Pasifik dan bermarkas di Kolombo, Sri Lanka.

FOCAL POINT :

Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri
 Sekretariat Negara RI
 Jl. Veteran III No. 9
 Jakarta 10110
 Telepon : (021) 384 6463
 Faksimili : (021) 386 6579, 386 0611

23). KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI (KEMENEG RISTEK)

NO	Nama Organisasi Internasional	Keanggotaan Indonesia		Unit Terkait di Kemlu	Keterangan
		Status dan Tahun	Dasar Hukum		
1	2	3	4	6	7
1	ASEAN Science Fund	Anggota (2000)	Keppres No. 95 Tahun 2003 ttg Pengesahan Agreement on the Augmentation of the ASEAN Science Fund.	Dit. KS ASEAN	ASEAN Science Fund dibentuk pada pertemuan ke-4 ASEAN Ministers for Science and Technology di Manila tahun 1989. Kemudian pada 7-8 April 2000 disepakati kontribusi setiap negara anggota yang tercantum dalam <i>Agreement on the Augmentation of the ASEAN Science Fund</i> .

2	Centre for Science and Technology of Non Aligned Movement (NAM) and Other Developing Countries	Anggota	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. Sosbud OINB	CST NAM dibentuk tahun 1985 dengan markas di New Delhi, India.
3	Standing Committee for Scientific and Technological Co-operation of OIC (COMSTECH)	Anggota	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. Sosbud OINB	COMSTECH adalah organ di bawah OKI. Sesuai asas kemanfaatan, pembayaran kontribusi pada organ-organ di bawah OKI ditangguhkan.

FOCAL POINT :

Kementerian Negara Riset dan Teknologi
 Gedung 2 BPPT, Lantai 6
 Jl. M.H. Thamrin No. 8,
 Jakarta 10340
 Telepon : (021) 316 9174
 Faksimili : (021) 310 2368, 3101728

24). KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP (KEMENEG LH)

NO	Nama Organisasi Internasional	Keanggotaan Indonesia		Unit Terkait di Kemlu	Keterangan
		Status dan Tahun	Dasar Hukum		
1	2	3	4	6	7
1	Regional Trust Fund for the Implementation of the Action Plan for the Protection and Development of the Marine Environment and Coastal Areas of the East Asian Seas (COBSEA) FUND 810 INS	Anggota (1981)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. PELH	COBSEA dibentuk tahun 1981 dengan tujuan untuk melindungi ekosistem laut di kawasan.
2	Trust Fund for the Basel Convention on the Control of Trans-boundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal (BC) FUND 3060 INS	Anggota (20 Sept 1993)	Keppres No. 61 Tahun 1993 ttg Pengesahan Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal Perpres No. 47 Tahun 2005 tentang Amandemen atas Konvensi Basel ttg Pengawasan Per-pindahan Lintas Ba-tas Limbah Berba-haya dan pembu-angannya	Dit. PELH	Basel Convention (BC) diadopsi tahun 1989 guna mengatur perpindahan lintas perbatasan sampah ber-bahaya.
3	Trust Fund for the Convention on Biological Diversity (CBD) FUND 5080 INS	Anggota (23 Agustus 1994)	UU No. 5 Tahun 1994 ttg Penge-sahan United Na-tions Convention on Biological Diversity.	Dit. PELH	CBD diadopsi tahun 1992 dengan Sekretariat di Montreal, Kanada.

4	Trust Fund for the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (MP) FUND 1040 INS	Anggota (1987)	Perpres No. 46 Tahun 2005 ttg Pengesahan Mon-treal Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer	Dit. PELH	Sekretariat berada di Nairobi, Kenya.
5	Trust Fund for the Core Budget of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)	Anggota (1992)	UU No. 6 Tahun 1994 ttg Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change.	Dit. PELH	
6	Trust Fund for the Vienna Convention on the Protection of the Ozone Layer (VC FUND 1030 INS)	Anggota (1987)	Keppres No. 23 tahun 1992 tentang Pengesahan Vienna Convention on the Protection of the Ozone Layer	Dit. PELH	Vienna Convention on the Protection of the Ozone Layer diadopsi tahun 1985.
7	United Nations Environment Programme (UNEP) FUND 700 INS	Anggota	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. PELH	Markas besar UNEP di Nairobi, Kenya.
8	Trust Fund for The Core Programme Budget for the Biosafety Protocol (BG) FUND 9340 INS (Cartagena Protocol)	Anggota (2000)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. PELH	
9	Kyoto Protocol	Anggota	UU No 17 Tahun 2004 ttg Pengesahan Kyoto Protocol to the UNFCCC	Dit. PELH	Kyoto Protocol diadopsi tahun 1997 di Kyoto, Jepang.
10	General Trust Fund for the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, its Subsidiaries Bodies and the Convention Secretariat (POPs) FUND 9400 INS	Anggota	UU No. 19 Tahun 2009 ttg Pengesahan Stockholm Convention	Dit. PELH	POPs diadopsi 17 Mei 2004.
11	Global Ecolabing Network	Anggota (Nov 2006)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)		Pembayaran kontribusi belum sesuai Keppres No. 64 Tahun 1999.

FOCAL POINT :

Kementerian Negara Lingkungan Hidup (Kemeneq LH)
 Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24,
 Jakarta Timur 13410
 Telepon : (021) 851 7184
 Faksimili : (021) 851 7184

25). KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (KEMENEG PP)

NO	Nama Organisasi Internasional	Keanggotaan Indonesia		Unit Terkait di Kemlu	Keterangan
		Status dan Tahun	Dasar Hukum		
1	2	3	4	6	7
1	United Nations Development Fund for Women (UNIFEM)	Anggota	UU No. 68 Tahun 1958 ttg Persetujuan Konvensi Hak Politik Kaum Wanita	Dit. HAM dan Kemanusiaan	UNIFEM dibentuk tahun 1976 guna melindungi hak-hak perempuan dengan markas besar di New York, AS.
2	International Research and Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW)	Anggota	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. HAM dan Kemanusiaan	INSTRAW dibentuk tahun 1976 dibawah ECOSOC.
3	United Nations Children's Fund (UNICEF)	Anggota (1950)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. HAM dan Kemanusiaan	UNICEF didirikan pada Desember 1946 dengan markas besar di New York, AS.

FOCAL POINT :

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (Kemeneq PP)
 Jl. Medan Merdeka Barat No. 15,
 Jakarta 10110
 Telepon : (021) 380 5563

26). KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA (KEMENEGPORA)

NO	Nama Organisasi Internasional	Keanggotaan Indonesia		Unit Terkait di Kemlu	Keterangan
		Status dan Tahun	Dasar Hukum		
1	2	3	4	6	7
1	World Anti Doping Agency (WADA)	Anggota	Perpres No. 101 Tahun 2007 ttg Pengesahan Inter-national Convention Against Doping in Sport	Dit. Sosbud OINB	WADA dibentuk 10 November 1994 guna mengkoordinasikan upaya anti-doping dalam dunia olah raga dengan markas besar di Montreal, Kanada.
2	ASEAN Schools Sports Council (ASSC)	Anggota (1978)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. Sosbud OINB	Pembayaran kontribusi belum sesuai Keppres No. 64 tahun 1999.
3	Asian Schools Sports Federation (ASSF)	Anggota (1992)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. Sosbud OINB	Pembayaran kontribusi belum sesuai Keppres No. 64 tahun 1999.
4	Asian Schools Football Federation (ASFF)	Anggota (1972)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. Sosbud OINB	Pembayaran kontribusi belum sesuai Keppres No. 64 tahun 1999.

FOCAL POINT :

Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga (Kemenegpora)
 Jl. Gerbang Pemuda No. 3, Senayan,
 Jakarta 10270
 Telepon : (021) 573 8317
 Faksimili : (021) 573 8317

27). KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT (KEMENEGPERA)

NO	Nama Organisasi Internasional	Keanggotaan Indonesia		Unit Terkait di Kemlu	Keterangan
		Status dan Tahun	Dasar Hukum		
1	2	3	4	6	7
1	United Nations Human Settlement Programme/UN Centre for Human Settlements (UN-Habitat)	Anggota (1976)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. PELH	Wakil Tetap Republik Indonesia dalam <i>Committee of Permanent Representative (CPR)</i> UN-HABITAT adalah Dubes RI di Nairobi, beberapa kegiatan UN-HABITAT di mana Indonesia berperan serta adalah: Slum Upgrading Facility (SUF) dan Experimental Reimbursable Seeding (ERSO)

FOCAL POINT :

Sekretariat Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenepera)
 Jl. Raden Patah I No. 1,
 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
 Telepon : (021) 722 6601/739 7727
 Faksimili : (201) 739 7727

28). KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)

NO	Nama Organisasi Internasional	Keanggotaan Indonesia		Unit Terkait di Kemlu	Keterangan
		Status dan Tahun	Dasar Hukum		
1	2	3	4	6	7
1	International Criminal Police Organization (ICPO)-Interpol	Anggota (1954)	Surat Keputusan Perdana Menteri No. 245/PM/1954 tanggal 5 Oktober 1954 tentang Pembentukan NCB-Interpol Indonesia	Dit. PI. Polkamwil	

FOCAL POINT :

Sekretariat NCB Interpol Indonesia (Polri)
 Telepon : (021) 721 8098/739 3690/721 8237
 Faksimili : (201) 720 1402 /726 9203

29). BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

NO	Nama Organisasi Internasional	Keanggotaan Indonesia		Unit Terkait di Kemlu	Keterangan
		Status dan Tahun	Dasar Hukum		
1	2	3	4	6	7
1	ASEAN - China Cooperative Operation in Response to Dangerous Drugs (ACCORD)	Anggota (2005)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. Sosbud OINB, Dit. KFA ASEAN	Dibentuk tahun 2000 saat <i>International Congress in Pursuit of a Drugs Free ASEAN 2015: Sharing the Vision, Leading the Change</i> di Bangkok, dibawah koordinasi United Nations Office in Drugs and Crime (UNODC)
2	Colombo Plan Drug Advisory Program (CP DAP)	Anggota (1953)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. Sosbud OINB	

FOCAL POINT :

Badan Narkotika Nasional (BNN)
 Gedung BNN, Jl. M.T. Haryono No.11,
 Cawang, Jakarta Timur
 Telepon : (021) 808 71 566/808 71 567
 Faksimil : (021) 808 85 225/8087 1591/8087 1592

30). ARSIP NASIONAL R.I. (ANRI)

NO	Nama Organisasi Internasional	Keanggotaan Indonesia		Unit Terkait di Kemlu	Keterangan
		Status dan Tahun	Dasar Hukum		
1	2	3	4	6	7
1	International Council on Archives (ICA)	Anggota (1968)	Keppres No. 105 Tahun 2004	Dit. Sosbud OINB	ICA berdiri tahun 1948 di Paris. Indonesia pernah menjadi Wakil Presiden ICA periode 1981-1986, menjadi anggota Komite Audio Visual ICA tahun 1986-1990 dan

					menjadi tuan rumah ICA Executive Board Meeting tahun 1982 di Bali.
2	Southeast Asia Regional Branch of ICA (SARBICA)	Anggota (1968)	Keppres No. 105 Tahun 2004	Dit. Sosbud OINB	SARBICA berdiri tanggal 9 Juli 1968. Indonesia menjadi tuan rumah SARBICA Conference tahun 1975 dan 1985 di Jakarta, menjadi Chairman of SARBICA periode 1974-1978, 1985-1989, 1995-1997.
3	Southeast Asia – Pacific Audio Visual Archives Association (SEAPAVAA)	Anggota (1996)	Keppres No. 105 Tahun 2004	Dit. Sosbud OINB	SEAPAVAA didirikan tahun 1996. Indonesia menjadi tuan rumah Second Conference of SEAPAVAA di Jakarta.

FOCAL POINT :

Biro Hukum dan Kepegawaian
 Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
 Jl. Ampera Raya No. 7
 Cilandak Timur
 Jakarta Selatan 12560
 Telepon : (021) 780 5851
 Faksimili : (021) 781 0280

31). BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)

NO	Nama Organisasi Internasional	Keanggotaan Indonesia		Unit Terkait di Kemlu	Keterangan
		Status dan Tahun	Dasar Hukum		
1	2	3	4	6	7
1	Partners in Population and Development (PPD)	Anggota (1994)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. PELH	Indonesia merupakan salah satu negara pendiri PPD.
2	International Council on Management of Population Programs (ICOMP)	Anggota (1991)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. PELH	Indonesia adalah salah satu negara pendiri ICOMP.

3	United Nations Population Fund (UNFPA)	Anggota (1973)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. PELH	UNFPA dibentuk tahun 1973 oleh ECOSOC guna mengatasi masalah kependudukan dan keluarga berencana dengan markas besar di New York, AS.
4	United Nations Population Fund (UNFPA) Representative Office in Indonesia	Kontributor	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. PELH	

FOCAL POINT :

Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional
 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
 Jl. Permata No. 1, Halim Perdanakusuma,
 Jakarta Timur
 Telepon : (021) 801 6504/800 9029
 Faksimili : (021) 809 4702

32). BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)

NO	Nama Organisasi Internasional	Keanggotaan Indonesia		Unit Terkait di Kemlu	Keterangan
		Status dan Tahun	Dasar Hukum		
1	2	3	4	6	7
1	World Association of Investment Promotion Agencies (WAIPA)	Anggota (2007)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. PPIH	Pembayaran kontribusi belum sesuai dengan Keppres No. 64 tahun 1999.
2	Brunei Darussalam – Indonesia – Malaysia – Philippines Facilitation Center (BIMP-FC)	Anggota (2006)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Ditjen. KS ASEAN	

FOCAL POINT :

Direktorat Promosi
 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
 Jl. Gatot Soebroto No. 44,
 Jakarta 12190
 Telepon : (021) 525 4945
 Faksimili : (021) 525 4945

Direktorat Kerjasama Bilateral dan Multilateral
 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
 Jl. Gatot Soebroto No. 44,
 Jakarta 12190
 Telepon : (021) 520 2045
 Faksimili : (021) 520 2045

33). BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL (BAKOSURTANAL)

NO	Nama Organisasi Internasional	Keanggotaan Indonesia		Unit Terkait di Kemlu	Keterangan
		Status dan Tahun	Dasar Hukum		
1	2	3	4	6	7
1	International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG)	Anggota	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. Sosbud OINB	IUGG dibentuk tahun 1919 dengan Sekretariat di Karlsruhe, Jerman.
7	International Cartographic Association (ICA)	Anggota	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. PI. Polkamwil	ICA dibentuk 9 Juni 1959.

FOCAL POINT :

Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL)
 Jl. Raya Jakarta-Bogor Km. 46
 Cibinong 16911
 Telepon : (021) 8752062 – 63, 8754592, 8757636, 87904762, 8753066
 Faksimil : (021) 8752064, 8753293, 8757635

34). BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA (BMKG)

NO	Nama Organisasi Internasional	Keanggotaan Indonesia		Unit Terkait di Kemlu	Keterangan
		Status dan Tahun	Dasar Hukum		
1	2	3	4	6	7
1	World Meteorological Organisation (WMO)	Anggota (1950)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. Sosbud OINB	WMO dibentuk tahun 1950, kemudian pada tahun 1951 menjadi Badan Khusus PBB dengan markas besar di Jenewa, Swiss. WMO sebelumnya bernama International Meteorological Organization (IMO).

FOCAL POINT :

Bagian Kerjasama, Biro Hukum dan Organisasi
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
Jl. Angkasa I No. 2
Kemayoran
Jakarta 10720
Telepone : (021) 424 6321
Faksimili : (021) 424 6703

35). BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)

NO	Nama Organisasi Internasional	Keanggotaan Indonesia		Unit Terkait di Kemlu	Keterangan
		Status dan Tahun	Dasar Hukum		
1	2	3	4	6	7
1	International Emergency Centre, International Atomic Energy Agency (IEC-IAEA), National Competent Authority Abroad (NCA-A)	Anggota (2002)	UU No. 10 Tahun 1997 ttg Perundang-undangan Ketenaga Nukliran	Dit KIPS	Pembayaran kontribusi belum sesuai dengan Keppres No. 64 tahun 1999.
2	International Emergency Centre, International Atomic Energy Agency (IEC-IAEA) (NCA-D)	Anggota (2002)	UU No. 10 Tahun 1997 ttg Perundang-undangan Ketenaga Nukliran	Dit. KIPS	Pembayaran kontribusi belum sesuai dengan Keppres No. 64 tahun 1999.

3	International Emergency Centre, International Atomic Energy Agency (IEC-IAEA) National Warning Point (NWP)	Anggota (2003)	UU No. 10 Tahun 1997 ttg Perundang-undangan Ketenaga Nukliran	Dit. KIPS	Pembayaran kontribusi belum sesuai dengan Keppres No. 64 tahun 1999.
---	--	----------------	---	-----------	--

FOCAL POINT :

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
 Jl Gajahmada no. 8
 Gedung B. Lt II
 Jakarta Pusat 10120
 Telepon : (021) 638 58629/638 58670/6385 8269
 Faksimili : (021) 635 8275

36). BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)

NO	Nama Organisasi Internasional	Keanggotaan Indonesia		Unit Terkait di Kemlu	Keterangan
		Status dan Tahun	Dasar Hukum		
1	2	3	4	6	7
1	United Nations Statistical Institute for Asia and the Pacific (UN-SIAP)	Anggota	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. PELH	Indonesia pernah menjadi anggota SIAP Governing Board periode 1995-2000. Indonesia kini menjadi anggota SIAP Governing Council periode 2005-2010.

FOCAL POINT :

Sekretaris Utama
 Biro Humas dan Hukum
 Badan Pusat Statistik (BPS)
 Jl. Dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta Pusat 10710
 Kotak Pos 1003 Jakarta 10010
 Telepon : (021) 384 1195/384 2508/381 0291
 Faksimili : (021) 385 7046

37). BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN)

NO	Nama Organisasi Internasional	Keanggotaan Indonesia		Unit Terkait di Kemlu	Keterangan
		Status dan Tahun	Dasar Hukum		
1	2	3	4	6	7
1	International Organization for Standardisation (ISO)	Anggota (1965)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. PPIH	Indonesia menjadi Liason Officer ISO untuk wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara, untuk masa jabatan, tahun 1996-2006. Anggota Council ISO masa jabatan 2005-2006. Chairman of ISO DEVCO (ISO Committee on Developing Country Matters) masa jabatan 2007-2008. Indonesia terpilih kembali untuk menjadi anggota ISO Council masa jabatan 2009-2010.
2	International Electrotechnical Commission (IEC)	Anggota (1954)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. PPIH	Menurut IEC Statutes and Rules Procedures (Article 4) keanggotaan dalam IEC diwakili oleh National Committee dari Negara yang bersangkutan.
3	Bureau Internationale de Poids et Measures (BIPM)	Anggota (1975)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. PPIH	Indonesia menandatangani Metre Convention tahun 1960.

FOCAL POINT :

Badan Standarisasi Nasional (BSN)
 Gd. Mangala Wanabakti,
 Jl. Jend. Gatot Subroto,
 Jakarta 10270
 Telepon : (021) 574 7043/574 7043/44
 Faksimili : (021) 574 7045

38). BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)

NO	Nama Organisasi Internasional	Keanggotaan Indonesia		Unit Terkait di Kemlu	Keterangan
		Status dan Tahun	Dasar Hukum		
1	2	3	4	6	7
1	International Atomic Energy Agency (IAEA)	Anggota (22 Juli 1957)	UU. No. 25 Tahun 1957 ttg Persetujuan Negara Republik Indonesia terhadap Anggaran Dasar Dari Badan Tenaga Atom Internasional	Dit. KIPS	IAEA dibentuk tahun 1957 guna meningkatkan kerjasama pemanfaatan teknologi nuklir secara damai dengan markas besar di Wina, Austria.

FOCAL POINT :

Biro Kerjasama Hukum dan Hubungan Masyarakat
 Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
 Jl. Kuningan Barat (Kh. Abd. Rokhim)
 Mampang Prapatan
 Jakarta Selatan
 Telepon : (021) 525 1109
 Faksimili : (021) 525 1110

39). BADAN SEARCH AND RESCUE (SAR) NASIONAL (BASARNAS)

NO	Nama Organisasi Internasional	Keanggotaan Indonesia		Unit Terkait di Kemlu	Keterangan
		Status dan Tahun	Dasar Hukum		
1	2	3	4	6	7
1	International Satellite System for Search and Rescue (COSPAS-SARSAT)	Anggota (5 Oktober 1991)	Kep. Menhub. No. KP.I/SR001/Phb-91 tgl. 5 Okt 1991	Dit. Sosbud OINB	Markas besar COSPAS-SARSAT berada di Montreal, Kanada.

FOCAL POINT :

Badan SAR Nasional (BASARNAS)
 Telepon : (021) 9316 7510/3483 2881/3483 2901/3483 2869
 Faksimili : (021) 3483 2884/3483 2901

40). LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (LAN)

NO	Nama Organisasi Internasional	Keanggotaan Indonesia		Unit Terkait di Kemlu	Keterangan
		Status dan Tahun	Dasar Hukum		
1	2	3	4	6	7
1	International Institute of Administration Science (IIAS)	Anggota (1992)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. Sosbud OINB	IIAS didirikan tahun 1930. Indonesia akan menjadi tuan rumah kongres IIAS-IASIA tahun 2010 di Bali
2	International Association of School and Institute of Administration (IASIA)	Anggota (1994)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. Sosbud OINB	IASIA didirikan tahun 1971. Indonesia akan menjadi tuan rumah kongres IIAS-IASIA tahun 2010 di Bali. Prof. Mustopadidjaja menjadi anggota Board of Management of IASIA
3	Eastern Regional Organisation of Public Administration (EROPA)	Anggota (1971)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. Sosbud OINB	EROPA didirikan tahun 1958. Indonesia pernah menjadi tuan rumah Konferensi EROPA pada Juni 1981 dan tuan rumah workshop internasional pada tahun 1972, 1977 dan 1988.
4	Network of Asia Pasific Schools and Institutes of Public Administration Governance (NAPSIPAG)	Anggota (2004)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. Sosbud OINB	NAPSIPAG didirikan pada Desember 2004. Dr. Asmawi Rewansyah (Kepala LAN) sebagai wakil Indonesia pada NAPSIPAG. Pembayaran belum sesuai Keppres No. 64 Tahun 1999.

FOCAL POINT :

Biro Perencanaan , Organisasi dan Kerjasama
 Lembaga Administrasi Negara (LAN)
 Jl. Veteran No. 10
 Jakarta Pusat 10110
 Telepon : (021) 352 4304/3868201-5
 Faksimili : (021) 345 5021

41). LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)

NO	Nama Organisasi Internasional	Keanggotaan Indonesia		Unit Terkait di Kemlu	Keterangan
		Status dan Tahun	Dasar Hukum		
1	2	3	4	6	7
1	Association of Asian Social Science Research Councils (AASSREC)	Anggota (1994)	SK Kepala LIPI No. 1384/A/2003 ttg Pembentukan Tim dan Sekretariat dalam rangka ke-anggotaan LIPI pa-da Organisasi-organisasi Internasional	Dit. Sosbud OINB	AASSREC dibentuk tahun 1973. Indonesia menjadi: 1) The Executive Council Member Association of Asian Social Science Research Council on the 18th Biennial General Conference of AASSREC, Agustus 2008; 2) Indonesia akan menjadi tuan rumah General Conference AASSREC tahun 2011 Indonesia sebagai First Vice President tahun 2007-2009 dan sebagai President tahun 2009-2011.
2	Rijksherbarium - Ondrzoekinstituut rijkuniversiteit Leiden – The Flora Malesiana Foundation	Anggota (1948)	SK Kepala LIPI NO. 1384/A/2003 ttg pembentukan Tim dan Sekretariat da-am rangka Keang-otaan LIPI pada organisasi-organisa-si Internasional .	Dit. Sosbud OINB	
3	International Council for Science (ICSU)	Anggota (1992)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. Sosbud OINB	ICSU dibentuk tahun 1931 dengan markas besar di Paris, Perancis.
4	International Federation of Social Science Organizations Secretariat Office (IFSSO)	Anggota (2002)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. Sosbud OINB	IFSSO dimulai tahun 1979.
5	Pacific Science Association (PSA)	Anggota (1967)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. Sosbud OINB	PSA dibentuk tahun 1920.

6	World Association of Industrial and Technological Research Organizations (WAITRO)	Anggota (2007)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. Sosbud OINB	WAITRO didirikan tahun 1970.
7	Asia Pacific Metrology Program (APMP)	Anggota	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. Sosbud OINB	Indonesia menanda tangani Metre Convention tahun 1960.
8	Committee on Data for Science and Technology (CODATA)	Anggota (1996)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. Sosbud OINB	CODATA didirikan tahun 1966. Indonesia terpilih sebagai anggota CODATA Task Group tahun 1997
9	Asia and Pacific Centre for Transfer of Technology (APCTT)	Anggota (2007)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. Sosbud OINB	APCTT didirikan tahun 1977

FOCAL POINT :

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
 Gedung Sasana Widya Sarwono Lt. 5
 Jl. Jend. Gatot Subroto No 10
 Jakarta Selatan 12710
 Telepon : (021) 5225 711 ext 234
 Faksimil : (021) 5277 183

42). LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

NO	Nama Organisasi Internasional	Keanggotaan Indonesia		Unit Terkait di Kemlu	Keterangan
		Status dan Tahun	Dasar Hukum		
1	2	3	4	6	7
1	Committee on Space Research (COSPAR)	Anggota	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)		COSPAR didirikan tahun 1958.
2	International Geosphere Biosphere Program (IGBP)	Anggota	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)		IGBP didirikan tahun 1987.

3	International Astronautical Federation (IAF)	Anggota	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)		IAF dibentuk tahun 1951 guna meningkatkan kerjasama internasional di ruang angkasa.
4	Science Committee on Solar Terrestrial Physics (SCOSTEP)	Anggota	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)		Markas besar SCOSTEP berada di Colorado, Amerika Serikat.
5	Inter-Islamic Network on Space Sciences and Technology (ISNET)	Anggota			ISNET adalah badan dibawah OKI. Sesuai asas kemanfaatan, kontribusi pada badan-badan OKI ditangguhkan.

FOCAL POINT :

Biro Humas dan Kerjasama Kedirgantaraan
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
Jl. Pemuda Persil No. 1, Jakarta 13220
Telepon : (021) 3192 7982 / 489 2802
Faksimili : (021) 489 2815

43). PERPUSTAKAAN NASIONAL

NO	Nama Organisasi Internasional	Keanggotaan Indonesia		Unit Terkait di Kemlu	Keterangan
		Status dan Tahun	Dasar Hukum		
1	2	3	4	6	7
1	The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)	Anggota (1950)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. Sosbud OINB	Pembayaran belum sesuai Keppres No. 64 Tahun 1999.
2	Congress of South East Asians Librarians (CONSAL)	Anggota (1975)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)	Dit. Sosbud OINB	Pembayaran belum sesuai Keppres No. 64 Tahun 1999.

FOCAL POINT :

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Jl. Salemba Raya 28A, Jakarta 10430
Telepon : (021) 315 4864
Faksimili : (021) 310 3554

44). KANTOR BERITA ANTARA (LKBN ANTARA)

NO	Nama Organisasi Internasional	Keanggotaan Indonesia		Unit Terkait di Kemlu	Keterangan
		Status dan Tahun	Dasar Hukum		
1	2	3	4	6	7
1	Organisation of Asia Pacific News Agency (OANA)	Anggota (1961)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)		<p>Pembayaran belum sesuai Keppres No. 64 Tahun 1999.</p> <p>OANA didirikan tanggal 22 Desember 1961.</p> <p>President OANA, Mr. Ahmad Mukhlis Yusuf, Dirut LKBN ANTARA (2007-2010)</p> <p>Secretary General, Mr. Saiful Hadi, Direktur Pemberitaan LKBN ANTARA, untuk masa jabatan 2007-2010</p>
2	International Islamic News Agency (IINA)	Anggota (1973)	(Tidak ada dalam catatan peraturan perundangan dari Setkab)		IINA merupakan organisasi dibawah OKI, sesuai asas kemanfaatan pembayaran kontribusi ditanggihkan.

FOCAL POINT :

LKBN Antara
Wisma ANTARA Lt. 20
Jl. Merdeka Selatan 17 Jakarta
Telepon : (021) 380 2383 ; Faksimil : (021) 386 5577

45). DINAS HIDRO OSEANOGRAFI (DISHIDROS) TNI AL

NO	Nama Organisasi Internasional	Keanggotaan Indonesia		Unit Terkait di Kemlu	Keterangan
		Status dan Tahun	Dasar Hukum		
1	2	3	4	6	7
1	International Hydrographic Organization (IHO)	Anggota (18 Oktober 1951)	Keppres No. 288 Tahun 1968 ttg Pengesahan Konvensi Organisasi Hidrografi Internasional. PP. No. 23 Tahun 1951 Juncto Keppres RI No. 164 Tahun 1960	Dit. P. Polkamwil	IHO dibentuk tahun 1921 dengan markas besar di Monako. IHO sebelumnya bernama International Hydrographic Bureau.

FOCAL POINT :

Dinas Hidro Oseanografi (Dishidros) TNI AL
Telepon : (021) 6471 4810, 6471 4809
Faksimili : (021) 6471 4819

46). OBSERVATORIUM BOSSCHA

NO	Nama Organisasi Internasional	Keanggotaan Indonesia		Unit Terkait di Kemlu	Keterangan
		Status dan Tahun	Dasar Hukum		
1	2	3	4	6	7
1	International Astronomical Union (IAU)	Anggota (1950)	Keppres No. 24 Tahun 1957	Dit. Sosbud OINB	Indonesia telah deapan kali mengadakan Konferensi Astronomi Internasional dalam kalender resmi IAU dan satu event internasional dalam payung komisi 46 IAU

FOCAL POINT :

Observatorium Bosscha
Institut Teknologi Bandung (ITB)
Jln. Ganesha No. 10
Bandung 40132
Telepon : (022) 251 5032, 278 6027
Faksimili : (022) 250 2360, 278 6001

47). PALANG MERAH INDONESIA (PMI)

NO	Nama Organisasi Internasional	Keanggotaan Indonesia		Unit Terkait di Kemlu	Keterangan
		Status dan Tahun	Dasar Hukum		
1	2	3	4	6	7
1	International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)	Anggota (1950)	Keppres No. 25 Tahun 1950	Dit. Sosbud OINB	IFRC dibentuk tahun 1919 dengan markas besar di Jenewa, Swiss.
2	International Committee of the Red Cross (ICRC)	Statutory Contributor (1950)	Keppres No. 25 Tahun 1950 dan UU No. 59 Tahun 1950	Dit. Sosbud OINB	Markas besar ICRC berada di Jenewa, Swiss.

FOCAL POINT :

Sekretariat Jenderal
 Palang Merah Indonesia (PMI)
 Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav. 96
 Jakarta Selatan 12790
 Telepon : (021) 7992325 ext. 308, 331
 Faksimili : (021) 7995188